

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian mengenai kemiskinan provinsi di pulau Kalimantan pada tahun 2005-2014 dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa kemiskinan yang terjadi dilihat dari tren tingkat kemiskinan di pulau Kalimantan, rata-rata dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 terus terjadi penurunan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan tren tingkat kemiskinan, Kalimantan barat menjadi provinsi di pulau Kalimantan yang paling tinggi jika dibandingkan 3 provinsi lainnya, sementara itu provinsi Kalimantan selatan menjadi provinsi terendah tren tingkat kemiskinannya di bandingkan provinsi lainnya.

Sementara itu, dari empat faktor yang digunakan, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Hasil estimasi yang diperoleh dari data panel menyebutkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh signifikan dengan koefisien negatif terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Pulau Kalimantan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia khususnya pemerintah provinsi di Pulau Kalimantan belum mampu melaksanakan pertumbuhan ekonomi yang memihak terhadap masyarakat miskin (*pro poor growth*).
2. Hasil estimasi menyebutkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan. Hasil tersebut sesuai

dengan hipotesis yang telah disusun. Peningkatan pengangguran di pulau Kalimantan akan menyebabkan kemiskinan yang terus meningkat. Pemerintah harus mampu untuk mengatasi permasalahan pengangguran terlebih dahulu sebelum fokus terhadap permasalahan kemiskinan.

3. Hasil estimasi menyebutkan bahwa Indek Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan beberapa provinsi di pulau Kalimantan. Dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, maka akan dapat menekan tingkat kemiskinan melalui pembukaan lapangan kerja baru.
4. Hasil estimasi data panel menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di beberapa Provinsi di pulau Kalimantan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak dapat menurunkan tingkat kemiskinan, artinya kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak berpihak kepada penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi hanya menguntungkan kelompok penduduk dengan pendapatan menengah keatas, sehingga pembagian kue pembangunan diindikasikan tidak merata.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya dan telah disimpulkan, maka terdapat beberapa saran terhadap permasalahan kemiskinan di pulau Kalimantan, yaitu:

1. Kebijakan yang berpihak kepada penduduk miskin melalui perluasan lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan dan pemerataan

pembangunan baik fisik seperti pembangunan akses transportasi untuk meningkatkan perekonomian penduduk yang jauh dari kota untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam jangka pendek dan menengah, serta pembangunan non fisik dari pembiayaan pendidikan yang lebih adil dan merata untuk menurunkan tingkat kemiskinan jangka panjang.

2. Pemerintah harus dapat mengontrol transmigrasi dari daerah lain agar dapat menjaga tingkat kemiskinan di setiap provinsi di pulau Kalimantan, karena pulau Kalimantan saat ini menjadi salah satu wilayah yang sangat diminati oleh tenaga kerja daerah lain atau Negara lain untuk memperoleh penghasilan. Jika transmigrasi meningkat, maka dapat mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk miskin di pulau Kalimantan.
3. Pemerataan distribusi pendapatan harus menjadi perhatian khusus dalam setiap kebijakan pembangunan ekonomi. Karena jika ketimpangan masih mencolok, maka tujuan pembangunan ekonomi belum tercapai. Melalui kebijakan *pro poor growth* yang telah disusun oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) harus mampu memanfaatkan momentum ini sebaik mungkin supaya permasalahan kemiskinan dapat teratasi dengan lebih optimal.
4. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus dapat mengatasi permasalahan pengangguran agar setiap penduduk memperoleh pekerjaan diberbagai sektor serta terus mengontrol setiap tenaga kerja luar daerah agar tidak mendominasi sektor-sektor penting yang dapat merugikan perekonomian penduduk setempat.